

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PAUD

Reza Aditya Ramadhani ^{a,1}, Dila Rukmi Octaviana ^{b,2}, Kusnul Fadlilah ^{c,3},
Firga Yoga Pratama ^{d,4}

^a SDN Plumpungrejo 04, ^b UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

^c IAIN Ponorogo, ^d SDN Plumpungrejo 04

¹ramadhanireza021@gmail.com; ²octavianadila920@gmail.com ³fadlilahkusnul18@gmail.com

⁴firgapratama@gmail.com

Informasi artikel

Received :

28 Agustus 2023

Revised :

9 September 2023

Publish :

30 September 2023

Kata kunci:

Pengelolaan dana

operasional

Pendidikan;

Lembaga Paud ;

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengkaji implementasi pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dalam pengumpulan data dari kepala sekolah PAUD RA dan KB dan Guru yang berwenang di bendahara. langkah analisis data melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana bantuan operasional lembaga PAUD dilaksanakan melalui tahapan berikut: Pertama, perencanaan proses perencanaan diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan siswa untuk menyusun RKAS BOP lembaga Paud. Kedua, pelaksanaan pengelolaan dana BOP diawali dengan pengambilan dana yang turun dari pemerintah. Pengeluaran digunakan beberapa item termasuk dari alat peraga edukatif (APE), sarana prasarana dan honorarium guru. Ketiga, evaluasi/pertanggungjawaban pelaporan dana BOP melalui dengan dua metode secara daring dan luring. Adapun pelaporan secara daring dikirim melalui link yang diberikan dari pihak Tim Manajemen BOP, sedangkan metode luring dengan bentuk hard file dengan pernyataan tanggung jawab.

ABSTRACT

The purpose of the study was to examine the implementation of the management of educational operational assistance funds at PAUD institutions. The research method uses descriptive qualitative research using interviews, observation, documentation in collecting data from the principal of PAUD RA and KB schools and teachers who are authorized to be in the treasury. steps of data analysis through data presentation, data reduction and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the management of operational assistance funds for PAUD institutions is carried out through the following stages: First, planning the planning process begins with identifying the needs of students to prepare RAKS BOP for early childhood institutions. Second, the implementation of BOP fund management begins with taking funds that come down from the government. Expenditures are used for several items, including educational aids (APE), infrastructure and teacher fees. Third, evaluation/responsibility for reporting BOP funds through two online and offline methods. The online reporting is sent via a government link, while the offline method is in hard file form with a statement of responsibility

Keywords:

Fund management

Education

operations;

Early Childhood

Education

Institutions;



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kewajiban setiap negara mempunyai kewenangan untuk mencerdaskan bangsa tanpa terkecuali, Negara Indonesia dalam amanat undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal. Satu diantara indikator lainnya kemajuan pembangunan sebuah bangsa adalah pengembangan Sumber Daya Manusia, bahkan pendidikan menjadi domain primer bagi setiap negara yang ingin maju serta ingin menguasai teknologi (Hamirul & Apriana, 2019). Undang Undang sistem Pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan pra sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini pada deretan Pendidikan formal berbentuk Taman Kanak Kanak, Raudhatul Atfal, atau dalam bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini semakin hari semakin diminati oleh Banyak masyarakat.

Penyelenggara terbesar saat ini lembaga PAUD merupakan oleh masyarakat dan swasta. Data yang tertera di Dapodik pada tahun 2019 memaparkan bahwa TK yang merupakan satuan dari PAUD terbanyak saat ini sebagian besar atau sebanyak 95,7% diselenggarakan oleh swasta. Meningkatnya jumlah PAUD yang didirikan oleh masyarakat tentunya sangat membantu pemerintah dalam peningkatan jalan PAUD. Namun, dengan demikian keberadaan PAUD tersebut perlu adanya pengontrolan perihal standar pelayanan minimal yang notabene tuntutan standar pelayanan yang berkelanjutan. Hal tersebut perlu diwujudkan dalam pelaksanaan PAUD supaya mutu layanan PAUD untuk anak usia 0-6 tahun yang merupakan masa (*the golden age*) mewujudkan yang terbaik memikirkan action nya dalam menumbuhkembangkan generasi muda penerus bangsa yang bermutu dan berarti. (Sudiyono & Murdiyningrum, 2020). Sehingga memberikan ketercapaian tujuan serta kualitas Pendidikan yang baik.(Latifah & Murniyati, 2022)

Sumbangsih Elemen masyarakat dalam menyelenggarakan PAUD patut dihargai. Pemberian terhadap lembaga untuk penguatan kelembagaan melalui anggaran stimulus, yaitu block grant, dana rintisan serta dana lainnya merupakan sudah menjadi upaya kuat bagi masyarakat dalam pendirian lembaga PAUD. Pada satu sisi,

hal ini menguntungkan sebab dapat meningkatkan akses layanan PAUD, tetapi hal ini juga akan merugikan bila izin pendirian PAUD tidak mengacu pada kondisi-kondisi sinkron aturan yang berlaku di standar minimal, utamanya terkait menggunakan wahan prasarana serta tenaga guru yang kompeten. Dengan demikian, masih perlukan kontrol terhadap kualitas asal setiap PAUD yang akan didirikan.

Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut serta mendukung menuntaskan program pendidikan, sampai detik ini pemerintahan dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan diantaranya berupa belum optimalnya pemerataan kesempatan Pendidikan, terbatasnya anggaran Pendidikan dan kualitasnya Pendidikan. (Widyatmoko, 2017) Hal tersebut senada dengan program pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang baik, maka pemerintah pusat telah menetapkan dalam peraturan kementerian agama pada nomor 17 tahun 2010 pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta peraturan pemerintah pada nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada tahun 2009.

Setiap lembaga sekolah tentunya dalam menerapkan implementasi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) memiliki kebijakan sendiri-sendiri yang telah diterima dari pemerintah setempat, sehingga dengan adanya kebijakan yang berbeda tentunya satu sekolah dengan yang lainnya sangat berbeda. Adapun penelitian yang dilakukan oleh akhirudin bahwa kebijakan sendiri yaitu suatu penentuan penetapan standar dari kreatifitas yang berdasarkan proses yang dilakukan setiap harinya yang memiliki landasan proses *masukan (input)*, *Proses(Proses, keluaran (output)*, *manfaat (outcome) dan Keuntungan (benefit)*, untuk mendapatkan hasil kinerja yang bermutu dan maksimal. Dalam implementasinya, Sadad dan Akhirudin memaparkan bahwa kebijakan dapat dimaknai dari penerapan dari kegiatan perencanaan, pengorganisaasian, monitoring , pelaporan dan evaluasi. Hal tersebut dalam proses aktivitasnya harus berirama dengan tujuan yang efektif, efisien dan produktif atau dengan maksud lain merupakan dari input, proses output, outcome dan benefit. (Akhirudin & Sadad, 2014)

Dana BOP adalah program pemerintah yang memiliki landasan untuk penyediaan pendanaan non personalia dan biaya operasional dengan pengeluaran atau biaya sebagaimana yang sudah diatur pemerintah pada tahun 2009. Hal demikian, terdapat beberapa jenis pembiayaan investasi serta personalia yang diperbolehkan di danai menggunakan dana BOP. Secara keseluruhan dengan jenis dana BOP di bagian penggunaan.

Secara umum Program Bantuan Operasional Pendidikan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua elemen masyarakat pada umumnya, hal tersebut untuk mendukung program PAUD Secara spesifik pada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) memiliki tujuan :

1. Membantu Pembiayaan Operasional RA
2. Mengurangi angka Putus pada jenjang Sekolah RA
3. Untuk peningkatan Jumlah partisipasi kasa (APK) siswa RA
4. Mewujudkan keberadaan Pemerintah pada (*Affirmative action*) bagi siswa RA dengan membantu (*discount fee*) tagihan pembiayaan sekolah.
5. Memberikan sumbangsih kesempatan yang menyeluruh dan merata (*equal opportunity*) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Dalam proses implementasi pelaksanaannya, Pengelolaan dana Bantuan Operasional pendidikan hakikatnya wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis dalam penggunaan dana Bantuan operasional Pendidikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai kementrian yang mengemban amanat tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional pendidikan.

Dalam membantu meringankan beban masyarakat terkait pembiayaan pendidikan pemerintah sudah mengeluarkan konsolidasi terkait bantuan yang bersifat non fisik. Selain meringankan beban orang tua untuk membiayai pendidikan kebijakan ini sangat berfungsi sebagai sarana untuk keringanan dan membantu penyediaan biaya pendidikan anak usia dini. Dana tersebut biasanya disebut dengan DAK non fisik yang diberikan oleh APBN kemudian dikelola oleh pemerintah daerah setempat baik kota maupun kabupaten. Dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya

kendala kendala. Terutama dalam penyebaran kepada pihak PAUD. Namun, dalam implementasinya salah satu PAUD memiliki administratif yang sederhana dari lembaga lain yaitu PAUD Islam Terpadu Adat Yogyakarta.

PAUD Islam Terpadu Adar yang beralamatkan di Ngajeg, Tirtomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang mendapatkan bantuan dana BOP dari pemerintah pusat. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa implementasi dana BOP di PAUD Islam Terpadu Adar sudah berjalan sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Dalam proses manajemen keuangan seperti: Mekanisme pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan meliputi alokasi dana BOP, penyaluran dan Pengambilan dana BOP

Berdasarkan Studi pendahuluan, melalui wawancara dengan kepala sekolah dan pengelola dana Bantuan Operasional mendapatkan beberapa dalam pelaksanaan program dana BOP melalui sebuah perencanaan yang matang sebelum menyusun sebuah proposal pengajuan dalam bentuk administrasi yang resmi dan juga melihat kebutuhan kebutuhan yang nantinya diperlukan dalam menunjang proses kegiatan para siswa untuk pembelajaran dan yang diperlukan sehingga nantinya akan diajukan ke dalam sebuah proposal untuk ajukan, maka peneliti tertarik menganalisis perencanaan, pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan atau tanggung jawab dana bantuan operasional sekolah di PAUD Islam Terpadu Adat Yogyakarta. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau melihat fenomena dari sebuah proses implementasi pengelolaan dana Bantuan operasional Pendidikan BOP di PAUD. Fenomena tersebut pengelolaan dana sangat berpengaruh penting terhadap kepercayaan masyarakat dalam. Disisi lain untuk menjaga administrasi yang rapi dan kesesuaian tujuan lembaga pendidikan yang baik dan berintegritas. Dengan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan serta tanggung jawab/ pengawasan pelaporan.

METODE

Penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Bantuan dana operasional Pendidikan (BOP) PAUD yang berlokasi di PAUD Islam Terpadu ADAT Yogyakarta. Peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif

deskriptif, untuk mendapatkan informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang objek penelitian. (Harahap, 2020)

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara kali ini dilakukan kepada 3 narasumber, *pertama* kepada kepala sekolah RA, dan KB selaku kepala pimpinan di sekolah yang mengetahui betul terkait implementasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). *kedua* bendahara selaku pemegang kewenangan keuangan di lembaga PAUD. Observasi dilakukan di sekolah yang beralamatkan di Kalasan Tirtomartani Yogyakarta. Pada kali ini, data dokumentasi sebagai pendukung bukti bukti yang diambil dari laporan pengelolaan dana bantuan operasional (BOP) pendidikan yang ada pada RA Islam Terpadu Adat Yogyakarta. Kemudian langkah terakhir yaitu melakukan analisis data yang terdiri dari penyajian data, reduksi data dan terakhir menarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012)

Adapun kajian Analisis terhadap data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah *pertama* implementasi pengelolaan dana PAUD RA dan KB. Menganalisis terhadap data pada implementasi dana BOP PAUD yang terdiri dari Perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan/evaluasi. *Kedua* alokasi dana khusus yang non fisik Bantuan Operasional Pendidikan BOP. Menganalisis terhadap data yang dibutuhkan dalam hal bukti bukti pembelian bantuan dan susunan rencana kegiatan serta anggaran untuk di kemudian disusun ke dalam bentuk pelaporan sebagai pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi pengelolaan dalam Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, untuk pelaporan atau pertanggungjawaban. Berikut penjabaran hasil penelitian tersebut :

1. Perencanaan/Planning Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan banyak komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan dana bos seperti Kepala sekolah selaku penanggung jawab, bendahara sekolah, sebagai dewan guru serta komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan melihat juknis yang sudah ditentukan oleh dari pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan

musyawarah bersama antara kepala sekolah, bendahara dan dewan guru yang berada di lingkungan sekolah selanjutnya menentukan langkah langkah mengidentifikasi terkait kebutuhan yang sekiranya urgen untuk dijadikan ke pengajuan penyusunan program RKAS BOP PAUD diawali atau dibutuhkan oleh para peserta didik dalam diajukan ke proposal dana bantuan operasional Pendidikan (BOP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah langkah langkah dalam penyusunan sebuah Rancangan Kegiatan Anggaran sekolah Bantuan Operasional Pendidikan untuk kebutuhan siswa diawali dengan mengidentifikasi sebuah kebutuhan apa saja yang akan diajukan ke dalam draf RKAS BOP PAUD proposal dalam satu tahun ke depan. Kepala sekolah sebagai *central figure* dalam mensosialisasikan dan perancang yang akan diumumkan ke warga sekolah dan masyarakat.

2. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional (BOP)

Dalam mengaplikasikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) didasarkan pada persetujuan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOP Sekolah, Dewan guru, serta Komite Sekolah yg wajib didaftar sebagai alat satu asal penerimaan pada RKAS BOP PAUD, di samping dana yg diperoleh asal Pemerintah Daerah atau asal lain yang sah. yang akan terjadi pengesahan penggunaan dana BOP dan dana lainnya tersebut harus dituangkan secara tertulis pada bentuk isu program rapat yg dilampirkan pertanda tangan semua peserta rapat yang hadir.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) selama satu tahun mendapatkan hibah satu kali dana BOP dari pemerintah yang diterimanya dari setiap daerah, pada pemberian dana tersebut yang dicairkan dua kali selama satu tahun. Adapun pengelolaanya yang sudah disetujui bahwa melakukan penyebaran dana tersebut sudah terbagi sebagaimana perencanaan di awal 30% untuk diberikan mukafaah kepada guru, serta 70 % persen dipergunakan untuk pembelian alat menunjang kegiatan pembelajaran siswa Alat Peraga Edukatif (APE) dan menunjang sarana prasarana.

Kegiatan operasional meliputi: biaya untuk kesejahteraan (uang lembur guru, musyawarah guru mata pelajaran kelompok kerja kepala sekolah dan guru, uang transport guru, dan uang lelah untuk guru yang bertugas diluar jam pelajaran dll. hal tersebut mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Adapun penggunaan BOP non operasional meliputi diantaranya : pembelian alat peraga edukatif (APE), pembelian Alat tulis, Pengadaan Buku bacaan anak, menunjang kegiatan belajar mengajar dan untuk penggunaan supervisi dan pelaporan.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) melalui proses pelaporan dilakukan oleh kepala sekolah baik dari RA maupun KB dan Bendahara sekolah. Pembuatan Laporan pertanggung jawaban dikerjakan oleh Bendahara sekolah, dilaksanakan secara bertahap setiap harinya kemudian pelaporan sesuai dengan anggaran yang direncanakan untuk pengerjaan administrasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan pengelolaan dana bantuan operasional Pendidikan dilakukan melalui dua unsur yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban secara daring dan luring atau biasa disebut dengan Offline dan online, untuk online, pertanggungjawaban dikirim melalui link yang sudah disediakan website yang ditentukan. sedangkan offline membuat pertanggung jawaban bentuk pernyataan. oleh kepala RA dan KB untuk diajukan ke pemerintah dan yayasan sekolah. Dalam pembuatan administrasi dilakukan oleh bendahara, dalam proses pengerjaannya secara bertahap dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh panduan anjuran juknis pemerintah kemudian rancangan anggaran kegiatan sekolah sesuai yang sudah diajukan, Untuk pelaporan kepada yayasan dilaksanakan secara luring yang pertama melalui direktur kemudian dilanjutkan kepada Yayasan Otomatis membuat laporan pemerintah adapun isi dalam pelaporan dana bantuan operasional pendidikan yang sudah dibelanjakan disertai nota atau kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban yang ditetapkan. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional pendidikan (BOP) ada beberapa buku

yang dibuat untuk membantu dalam tata kelola dana tersebut seperti buku umum, buku pembantu kas umum, buku bank.

PEMBAHASAN

Analisis pengelolaan dalam proses penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan BOP memaparkan bahwa pengorganisasian bantuan pendanaan tersebut sudah pada umumnya yang mana sesuai pada regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya, mulai dari pelaksanaan pemberian bantuan, pengelolaan bantuan BOP, penggunaan dana bantuan dilakukan sesuai terkait peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian pengawasan dan laporan pertanggung jawaban untuk peningkatan pengawasan.

Lembaga PAUD Islam Terpadu ADAT merupakan Lembaga Pendidikan swasta yang bernaung di bawah Yayasan Arrafif. Pada setiap tahunnya Lembaga ini mendapatkan bantuan dana operasional pendidikan dari pemerintah yang biasanya dalam setahun satu kali, untuk proses pencairan dana kurun waktu dua kali salam setiap semester. Dalam menunjang semua biaya operasionalnya, implementasi Pelaksanaan pada bantuan operasional Pendidikan sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. adapun komponen komponen yang terlibat dalam penyusunan RKAS bantuan operasional Pendidikan PAUD antara lain kepala sekolah, guru bendahara dan warga sekolah. Adapun langkah-langkahnya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/tanggung jawab. Adapun perencanaan yang disusun oleh kepala sekolah yang nantinya apa saja yang dibutuhkan dalam satu tahun kedepan untuk direncanakan, kemudian untuk pelaksanaanya berupa mengikuti pedoman yang sudah dianggarkan di awal untuk dimanfaatkan dalam proses pembelian dan diperbolehkan untuk pembayaran kepada honorarium para guru. selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional Pendidikan melalui dua metode, pertama secara daring, kemudian kedua secara luring, baik secara daring meliputi pengiriman file laporan hasil administrasi yang sudah dilakukan kepada pemerintah yang sudah diberikan akses link yang ada, kemudian secara luring yaitu meliputi pembuatan laporan yang bertanda tangan di kertas serta pembukuan laporan untuk di dokumentasikan. kepala sekolah sebagai *central figure* di lembaga sekolah yang memiliki kewenangan atas pelaporan pertanggungjawaban

dana BOP, yang nantinya akan dilaporkan kepada beberapa pihak di lembaga sekolah maupun pemerintah, Adapun di lembaga sekolah mulai dari komite sekolah yang nantinya dilanjutkan kepada ketua Yayasan Lembaga PAUD. Selanjutnya guru yang membantu proses penyusunan administrasi pelaporan, yang didalamnya perlu dicantumkan bukti bukti pembelian barang sebagai pelaporan yang resmi sesuai ketentuan yang tertera pada juknis.

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan dari Rini Sundari dan Nur Handayani, hasil penelitiannya diantaranya lembaga sekolah dalam pengelolaan dana BOP dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan yang sudah ditetapkan sebelumnya akan tetapi perlu diadakan peningkatan lebih Panjang dan berlanjut terutama pada titik pertanggungjawaban setelah penggunaan dana bantuan agar tujuan yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan baik. (Sundari and Handayani, 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh arif januwarsa bahwa dalam implementasi pengelolaan dana bantuan operasional Pendidikan BOP meliputi : *pertama*, pelaksanaan tahap persiapan program Bantuan Operasional Pendidikan yang sudah dilakukan dengan maksimal, *kedua*, pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan dengan baik. *Ketiga*, pelaksanaan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh manajemen tim BOP. *Keempat*, bahwa hasil monitoring evaluasi dialirkan sesuai pembukuan juknis yang ada.(Arief Januwarsa, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan BOP yang ada di PAUD dapat dikategorikan dalam proses pelaksanaannya cukup baik dan dikerjakan sesuai petunjuk yang sudah ada. Dapat disimpulkan pula sebagai berikut : Pelaksanaan implementasi pengelolaan BOP mengacu pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban yang sudah berjalan sesuai dengan juknis. Langkah Langkah penyusunan kebutuhan atau RKAS PAUD tentunya Diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan PAUD. Pelaksanaan bantuan dana BOP yang dilaksanakan sudah cukup baik, Adapun komponen yang terlibat di sekolah dalam penyusunan perencanaan yang akan dibutuhkan dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan untuk keperluan yang terkait dengan pembelian alat APE untuk menunjang proses

pembelajaran dan sarana prasarana diambil 70 % dan sisinya 30 % untuk kebutuhan honorarium guru. Pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan BOP melalui proses pelaporan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang dibantu oleh bendahara sekolah. Adapun penyusunan laporan dikerjakan secara bertahap untuk guna untuk administrasi yang baik. Untuk proses pelaporan meliputi dua cara, baik secara online maupun offline.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini terutama terkait dengan PAUD-IT Idar Yogyakarta. serta pengelola jurnal ABATA yang telah menerbitkan jurnal ini.

REFERENSI

- Akhirrudin, & Sadad, A. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Bergulir. *Administrasi Pembangunan*, 2(3), 227–360.
- Akhiruddin and Sadad, A. (2014) ‘Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Bergulir’, *administrasi Pembangunan*, 2(3), pp. 227–360.
- Arief Januwarso (2018) ‘Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Kabupaten Bojonegoro’, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Implementasi*, (6), pp. 254–261.
- Azhari, U. L. and Kurniady, D. A. (2016) ‘Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah’, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2). doi: 10.17509/jap.v23i2.5631.
- Creswell, J. W. 2015. *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*. (S. Z. Qudsy, Ed.). New York: Sage Publications LTD.
- Creswell, J. W. 2015. *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*. (S. Z. Qudsy, Ed.). New York: Sage Publications LTD.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (2020) ‘Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qur’an’.
- Hamirul, H. and Apriana, D. (2019) ‘Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran’, *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), p. 55. doi: 10.31851/jmksp.v4i1.2475.
- Hamirul, H., & Apriana, D. (2019). Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2475>
- Harahap, N. (2020) ‘Penelitian Kualitatif’, Medan ; PT. Wal ashri Publishing, cetakan

- pertama, pp. 2-196
- Hosnan, M. 2016. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21; Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hosnan, M. 2016. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21; Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- King, D. Y. 2018. Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 53(2), 603–624.
- King, D. Y. 2018. Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 53(2), 603–624.
- Komara, E. 2014. *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Komara, E. 2014. *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Latifah, I., & Murniyati, S. (2022). PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI KELOMPOK BERMAIN AL-LUBAWI SALATIGA. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.325>
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudiyono and Murdiyaningrum, Y. (2020) ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Tahun 2019’, *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), pp. 63–78. doi: 10.24832/jpkp.v13i1.340.
- Sudiyono, & Murdiyaningrum, Y. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 63–78. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i1.340>
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. PT. Alfabeta cetakan ke 19 pp 6-346.
- Sundari, R. and Handayani, N. (2019) ‘Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD di TK Islam Bina Insani’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(1), pp. 1–16.
- Waliyah, S. et al. (2021) ‘Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1’, *77 Transformasi Manageria*, 1(1), pp. 77–98.
- Widyatmoko, S. (2017) ‘Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemas I Surakarta’, *Manajemen Pendidikan*, 12(3), pp. 153–160. doi: 10.23917/jmp.v12i3.5528.
- Widyatmoko, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemas I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153–160. <https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>